

Kontribusi *Green Economy* Cegah Laju Inflasi demi Kestabilan Ekonomi
Contribution Of Green Economy To Prevent Inflation For Economic Stability

¹*Kurnia Gischa Tristiya, ¹Dwi Utari, ¹Nanda Yuma Pratiwi, ¹Nainta Agustanta

¹Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia.

ARTIKEL INFO

Diterima
Oktober 2025

Dipublikasi
November 2025

ABSTRAK

Ekonomi hijau berperan penting dalam membantu mengatasi inflasi dan menciptakan kestabilan ekonomi melalui pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana transisi menuju ekonomi hijau dapat meningkatkan efisiensi sumber daya, membuka lapangan kerja baru, dan mendukung keberlanjutan ekonomi. Sasaran utama penelitian ini adalah merumuskan strategi kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi hijau dan stabilitas ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari publikasi ilmiah, literatur, dan laporan lembaga. Penelitian ini menggunakan model analisis konsep Miles dan Huberman (1994), data diperoleh melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai kontribusi ekonomi hijau dalam mencegah inflasi dan mencapai stabilitas ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi hijau berpotensi besar mendukung kestabilan ekonomi dan mengatasi inflasi melalui peningkatan efisiensi sumber daya dan penciptaan lapangan kerja baru. Transisi ini dapat memperkuat perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Kesimpulan dan rekomendasi dalam penelitian ini menegaskan perlunya kebijakan mendukung inovasi, efisiensi energi, dan pengelolaan transisi secara hati-hati untuk meminimalkan dampak inflasi, serta mendorong investasi pada ekonomi hijau demi kestabilan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Green Economy, Inflasi, Stabilitas Ekonomi

ABSTRACT

The green economy plays an important role in helping to overcome inflation and create economic stability by reducing dependence on fossil fuels. This study aims to analyze how the transition to a green economy can improve resource efficiency, create new jobs, and support economic sustainability. The main objective of this study is to formulate policy strategies that support green economic development and economic stability. The research method used is descriptive qualitative, which involves collecting and analyzing data from scientific publications, literature, and institutional reports. This study uses the Miles and Huberman (1994) concept analysis model, with data obtained through a process of reduction, presentation, and conclusion drawing to gain an in-depth understanding of the contribution of the green economy in preventing inflation and achieving economic stability. The results of the study show that the green economy has great potential to support economic stability and overcome inflation through increased resource efficiency and the creation of new jobs. This transition can strengthen the economy and improve the quality of life of the community in a sustainable manner. The conclusions and recommendations in this study emphasize the need for policies that support innovation, energy efficiency, and careful management of the transition to minimize the impact of inflation, as well as encourage investment in the green economy for economic stability and improved community welfare.

Keywords: Green Economy, Inflation, Economic Stability

*e-mail:
kurniagischa.2023@student.uny.ac.id

© Universitas Muhammadiyah Palangkaraya



© 2025 Kurnia Gischa Tristiya, Dwi Utari, Nanda Yuma Pratiwi, Nainta Agustanta. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Ekonomi hijau merupakan pengembangan dari konsep pembangunan ekonomi yang menjadi sorotan belakangan ini. Beberapa lembaga internasional terus memperdebatkan definisi yang tepat untuk istilah "ekonomi hijau". Menurut Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP/2011), "ekonomi hijau" adalah sistem ekonomi yang meningkatkan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam jangka panjang tanpa menimbulkan bahaya lingkungan yang signifikan atau kelangkaan ekologi untuk generasi mendatang. Pemerintah Indonesia (2010) mendefinisikan ekonomi hijau sebagai pendekatan pembangunan yang menekankan internalisasi biaya yang terkait dengan kerusakan lingkungan dan penurunan sumber daya alam. Ekonomi hijau bertujuan untuk membedakan pertumbuhan ekonomi dari kerusakan lingkungan dengan mengutamakan energi terbarukan, penggunaan sumber daya yang efisien, dan inovasi (Bank Dunia, 2012). Pada intinya, ekonomi hijau mengacu pada cara-cara mengembangkan perekonomian yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan serta keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan.

Sejak tahun 1989, sekelompok ekonom lingkungan di Inggris merilis laporan berjudul *Blueprint for a Green Economy*, yang memperkenalkan istilah "ekonomi hijau". Laporan kedua, *Greening the World Economy* keluar pada tahun 1991, dan laporan ketiga, *Measuring Sustainable Development* keluar pada tahun 1994. Laporan-laporan ini ditujukan kepada pemerintah untuk memperhatikan aspek lingkungan dalam perekonomian. Pada tahun 2008, ketika terjadi krisis ekonomi di seluruh dunia, UNEP mendukung ide paket stimulus hijau dan menentukan bidang-bidang mana yang dapat memulai konsep ekonomi hijau. Mereka meluncurkan inisiatif ekonomi

hijau untuk membantu menghidupkan sektor yang tidak ramah lingkungan.

Menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB di Kopenhagen pada Juni 2009, PBB mengeluarkan pernyataan yang mendukung penerapan ekonomi hijau sebagai langkah transformasi untuk mengatasi krisis. Selain itu, pada Februari 2010, para menteri dan ketua delegasi Forum Lingkungan Tingkat Menteri Global UNEP di Nusa Dua juga mengakui bahwa konsep ekonomi hijau memiliki potensi besar untuk mengatasi tantangan serta menciptakan peluang ekonomi. Selanjutnya, tema ekonomi hijau menjadi tema utama konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan (Rio+20), di mana ekonomi hijau dianggap penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tenaga kerja yang produktif dan layak bagi semua orang.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami kemajuan pesat dalam pengembangan ekonomi hijau, seiring dengan semakin tingginya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan dan dampak buruk dari praktik bisnis tradisional. Terselenggaranya ekonomi hijau dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi inflasi. Hubungan antara inflasi dan ekonomi hijau adalah bahwa transisi menuju ekonomi hijau dapat memicu kenaikan harga barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan inflasi. Namun, dengan langkah-langkah antisipasi yang tepat, seperti memberikan informasi yang komprehensif dan menggunakan insentif serta subsidi pemerintah, dampak inflasi hijau dapat diminimalkan. Bocken dan Geradts (2020) menekankan bahwa inovasi bisnis yang berkelanjutan adalah kunci untuk mencapai keberlanjutan korporat dengan menciptakan produk dan layanan yang lebih ramah lingkungan.

Ekonomi hijau dapat membantu mengatasi inflasi melalui pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Ketergantungan yang tinggi pada bahan bakar fosil sering kali membuat ekonomi rentan terhadap kenaikan harga minyak dunia. Dengan beralih ke sumber energi terbarukan, negara dapat mengurangi impor bahan bakar fosil dan mengurangi tekanan inflasi yang berasal dari eksternal. Selain itu, ekonomi hijau juga dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor-sektor yang berkelanjutan. Peningkatan lapangan kerja ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan pada akhirnya membantu meredam tekanan inflasi. Dalam jangka panjang, ekonomi hijau dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil dan tahan terhadap guncangan. Secara keseluruhan, peralihan pada ekonomi hijau ini memerlukan investasi dan dukungan yang kuat dari semua *stakeholder*, termasuk pada peningkatan regulasi dan penegakan hukum agar dapat mencapai keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Peningkatan regulasi, penegakan hukum, dan koordinasi antara pemangku kepentingan dan masyarakat merupakan strategi utama untuk menanggulangi hambatan terhadap ekonomi hijau. Hal ini mencakup peningkatan perlindungan lingkungan negara, pengenalan paradigma ekonomi baru, dan promosi konservasi lingkungan melalui langkah-langkah pemulihan. Kebijakan dan keputusan kebijakan dipengaruhi oleh isu lingkungan dan lembaga pemerintah daerah memainkan peran penting dalam mempromosikan keselarasan sektoral dan merestrukturisasi sumber daya untuk mencegah krisis lingkungan. Pemerintah perlu berinvestasi dalam transformasi ekonomi hijau untuk mendukung pengembangan industri ramah lingkungan dan memerangi perubahan iklim meskipun peralihan ini membutuhkan biaya tinggi. Agar produk hijau lebih terjangkau diperlukan insentif pembelian, serta pengelolaan investasi harus transparan

dan diawasi ketat untuk mencegah praktik korupsi. Inisiatif penelitian dan pengembangan yang didanai pemerintah serta kebijakan publik mendukung teknologi hijau berperan penting dalam memajukan inovasi ekologi, mengurangi emisi, dan meningkatkan efisiensi. Dengan menerapkan mekanisme seperti pajak karbon atau sistem *cap and trade*, pemerintah dapat mendorong investasi sektor swasta dalam teknologi berkelanjutan. Kebijakan ini tidak hanya mengurangi dampak lingkungan tetapi juga berkontribusi pada keadilan sosial dengan mendistribusikan manfaat ekonomi hijau secara luas. Namun, efektivitasnya bergantung pada desain kebijakan dan konteks penerapannya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggali lebih dalam kontribusi *green economy* dalam mencegah laju inflasi demi mewujudkan kestabilan ekonomi. Metode deskriptif kualitatif merupakan salah satu bentuk penelitian yang termasuk dalam pendekatan kualitatif. Metode ini menekankan pada analisis data yang menghasilkan uraian atau gambaran fenomena secara mendalam, bukan berupa angka-angka atau koefisien tentang hubungan antar variabel. Karakteristik dari deskriptif sendiri adalah kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka seperti kuantitatif (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021). Pada dasarnya penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, seperti situasi sosial, pendapat-pendapat yang berkembang, akibat atau efek yang terjadi dan sebagainya (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021). Jenis penelitian deskriptif kualitatif menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan-perlakuan lain. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan pemahaman yang lebih dalam mengenai fenomena yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini dilakukan juga dengan mengumpulkan berbagai data dari publikasi ilmiah sebuah lembaga dan berbagai literatur para ahli yang nantinya dianalisa menjadi sebuah kesimpulan dan rekomendasi. Literatur yang digunakan meliputi jurnal, artikel ilmiah, laporan kelembagaan, dan literatur lainnya yang tentunya berkaitan akan fokus pembahasan.

Model analisis data dalam penelitian ini mengacu pada konsep Miles dan Huberman (1994) yang mencakup tiga langkah utama, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Aktivitas dalam analisis data menurut Miles dan Huberman, yaitu:

1. Reduksi Data: Merupakan langkah awal yang penting dalam proses analisis data kualitatif. Kegiatan ini melibatkan pemilihan, penyederhanaan, dan pengorganisasian data mentah agar lebih terarah dan bermakna. Peneliti menentukan data mana yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut, serta mengabaikan data yang tidak diperlukan. Reduksi data juga mencakup proses pengkodean, penarikan tema, penyusunan pola, hingga penyusunan narasi yang menggambarkan inti dari data yang diperoleh. Tujuan utamanya adalah untuk memfokuskan perhatian pada hal-hal penting, sehingga data menjadi lebih mudah dipahami dan dianalisis. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan sejak awal pengumpulan data dan akan mempengaruhi langkah-langkah selanjutnya dalam penelitian.
2. Penyajian Data: Cara untuk menata dan menyusun data yang telah disederhanakan ke dalam bentuk yang sistematis dan mudah dibaca, seperti dalam bentuk narasi, tabel, grafik, atau bagan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data sering kali menggunakan bentuk teks naratif yang menggambarkan temuan secara runtut dan logis. Tujuan dari *display* data adalah untuk membantu peneliti melihat gambaran

menyeluruh dari data yang telah dikumpulkan, memahami hubungan antar data, serta merancang langkah analisis atau tindakan selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Penyajian data yang baik memungkinkan penarikan kesimpulan yang lebih akurat.

3. Penarikan Kesimpulan: Kesimpulan tidak diambil secara mendadak di akhir proses, tetapi mulai dirumuskan sejak awal penelitian dan terus berkembang seiring berjalannya proses analisis. Peneliti harus aktif dalam menginterpretasi data agar tidak hanya menjadi kumpulan informasi yang tidak bermakna. Kesimpulan awal biasanya bersifat sementara dan bisa berubah tergantung pada data tambahan yang ditemukan. Namun, jika kesimpulan awal mendapat dukungan dari bukti-bukti yang kuat dan konsisten, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa temuan tersebut valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang berkesinambungan dalam analisis data kualitatif.

Ketiga komponen utama tersebut harus ada dalam analisis data kualitatif karena keterkaitan harus dikomparasikan untuk menentukan arahan isi kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian. Dalam memastikan kebenaran data yang telah dikumpulkan, peneliti melakukan validitas data penting agar interpretasi peneliti dapat dipercaya. Pada riset kualitatif ini tentunya interpretasi peneliti adalah kunci utama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh *Green Economy* terhadap Stabilitas Ekonomi

Green economy memiliki potensi dalam memainkan peran mencapai keberlanjutan

untuk mengatasi tantangan lingkungan yang besar. Dengan menekankan pada praktik bisnis yang ramah lingkungan, sumber energi terbarukan, dan pemanfaatan sumber daya yang efisien, *green economy* ini tentunya juga membawa dampak positif pula bagi pertumbuhan ekonomi. Di mana pada konsep ini, *green economy* mewujudkan keseimbangan dan perkembangan ekonomi yang mengedepankan prinsip kesejahteraan sosial. Hal tersebut tentunya sangat berbeda dengan ekonomi tradisional, yang di mana pertumbuhan ekonomi sering kali bergantung pada eksploitasi sumber daya yang berlebihan dan pada akhirnya hanya akan menambah momok permasalahan kerusakan lingkungan yang lebih meluas. Terciptanya *green economy* di masa sekarang ini menciptakan prospek ekonomi baru yang sebelumnya belum terealisasi secara maksimal, dengan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan memperkenalkan sebuah inovasi dalam teknologi yang ramah lingkungan merupakan kunci penting dalam implementasinya. Prospek tersebut berupa pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru, dan peningkatan daya saing (Guryeva, 2024).

Penciptaan lapangan kerja baru di berbagai sektor dengan adanya *green economy* ini terbuka sangat luas. Penciptaan peluang kerja baru adalah salah satu aspek yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial. Pertumbuhan ini membantu berkontribusi pada pelestarian stabilitas ekonomi, yang merupakan manfaat lainnya (Scarpellini, 2023). Dapat dilihat pada sektor energi terbarukan yang ada, seperti matahari, angin, dan biomassa, yang tentunya memerlukan adanya tenaga kerja terampil dalam hal instalasi, pemeliharaan, dan pengoperasian teknologi inovasi yang dirancang. Prospek pekerjaan baru dalam hal ini mencakup insinyur, teknis, serta pengembang teknologi yang berfokus pada efisiensi dan pengurangan gas emisi karbon.

Tak hanya itu saja, peluang kerja dapat kita tengok pula pada sektor pertanian yang berkelanjutan, pengelolaan limbah, dan infrastruktur hijau yang dapat berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja. Misalnya, pertanian berkelanjutan membutuhkan pekerja untuk mengelola lahan dengan metode ramah lingkungan yang mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dan melestarikan kesuburan tanah. Sementara itu, di sektor pengelolaan limbah, industri daur ulang dan pengolahan limbah elektronik semakin berkembang, menciptakan pekerjaan dalam pengumpulan, pemrosesan, dan desain sistem pengelolaan limbah yang lebih efisien. Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur hijau, seperti transportasi berbasis listrik dan konsep bangunan hemat energi, yang membutuhkan tenaga kerja di bidang konstruksi, desain, dan perawatan fasilitas yang mendukung keberlanjutan.

Di samping itu, inovasi dalam teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk mendukung sektor energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam. Pekerjaan di sektor ini meliputi pengembangan perangkat lunak untuk sistem manajemen energi atau aplikasi yang membantu mengurangi jejak karbon, serta penelitian dan pengembangan solusi teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Selain itu, dengan meningkatnya permintaan akan pendidikan dan pelatihan hijau, lembaga pendidikan juga memainkan peran penting dalam mempersiapkan tenaga kerja terampil untuk sektor ekonomi hijau. Pendidikan dan pelatihan di bidang energi terbarukan, pengelolaan limbah, serta desain dan konstruksi bangunan ramah lingkungan semakin diminati untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang.

Peningkatan daya saing menjadi elemen dalam menghadapi tantangan global, menarik investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan adanya adopsi teknologi ramah lingkungan dan energi

terbarukan, negara yang mengintegrasikan teknologi hijau dalam proses produksi dan operasionalnya akan memiliki keunggulan kompetitif di pasar global yang semakin menuntut keberlanjutan. Penggunaan energi terbarukan tidak hanya mengurangi biaya energi dalam jangka panjang, tetapi juga dapat mengurangi jejak karbon dan meningkatkan citra perusahaan atau negara di mata konsumen dan investor yang semakin peduli terhadap isu-isu lingkungan. Selain itu, *green economy* membuka peluang baru dalam pengembangan produk dan layanan ramah lingkungan yang semakin dicari oleh konsumen global. Dengan demikian, adopsi teknologi hijau dapat memperkuat daya saing suatu negara atau perusahaan dalam pasar internasional yang semakin mengutamakan keberlanjutan.

Ketergantungan pada impor energi menyebabkan pengeluaran yang besar untuk membeli energi dari luar negeri, sehingga hal tersebut sangat merugikan neraca perdagangan karena adanya aliran uang keluar yang terus menerus untuk membayar impor energi. Oleh karena itu, *green economy* hadir untuk mengatasi masalah tersebut sebab negara dapat memanfaatkan energi terbarukan yang dapat mengurangi pengeluaran uang tentunya, yang nantinya juga dapat menciptakan kemandirian negara yang berdampak baik pada neraca perdagangan. Dana yang semula untuk impor energi, negara dapat mengalihkannya pada investasi lain yang lebih produktif bagi kestabilan ekonomi. Negara yang mandiri ini akan lebih tahan terhadap tekanan eksternal dan memperkuat stabilitas mata uang. Pada akhirnya, negara mampu untuk mengurangi kerentanannya terhadap gejolak ekonomi global.

Salah satu contoh yang paling jelas tentang prinsip ini adalah penekanan yang diberikan oleh pemerintah Kosta Rika pada perlindungan lingkungan alam serta promosi penggunaan bentuk-bentuk energi terbarukan.

Kosta Rika telah membangun reputasi internasional sebagai negara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, dengan sumber daya alam dan lingkungan sebagai dasar model pembangunan mereka. Ekonomi negara ini tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan rata-rata di Amerika Latin, Karibia, dan OECD dalam dua dekade terakhir, berkat kebijakan terbuka terhadap perdagangan dan investasi asing langsung (OECD, 2023). Negara ini telah berkomitmen untuk mencapai status netral karbon pada tahun 2021 dan telah menetapkan target yang ketat untuk mencapai tujuan ini pada tanggal tersebut. Tingkat ketergantungan Kosta Rika pada bahan bakar fosil telah menurun secara signifikan sebagai akibat dari investasi negara tersebut dalam sumber-sumber energi terbarukan seperti tenaga hidroelektrik, energi angin, dan reboisasi.

Hubungan *Green Economy* dengan Penurunan Tekanan Inflasi

Ketergantungan pada bahan bakar fosil sering kali menyebabkan ketidakstabilan ekonomi karena fluktuasi harga energi yang dipengaruhi oleh faktor global, seperti ketegangan geopolitik dan perubahan internasional market. Sebagian strategi untuk memecahkan permasalahan ini adalah dengan beralih ke *renewable energy* atau energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, yang lebih stabil dalam hal biaya operasional setelah investasi awal. Dengan berkurangnya ketergantungan pada energi fosil, harga energi domestik menjadi lebih terjaga, yang membantu menekan volatilitas biaya produksi dan transportasi, serta berdampak positif pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Selain itu, kebijakan yang mendukung sektor hijau dapat memperkuat kepercayaan investor, baik di dalam negeri maupun internasional. Ketika negara menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan, investor akan lebih cenderung menyalurkan dana ke sektor-sektor yang lebih ramah lingkungan

dan berkelanjutan. Peningkatan investasi di sektor ini tidak hanya membuka peluang lapangan pekerjaan baru, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam berbagai industri. Sektor-sektor baru yang tumbuh dari adopsi teknologi hijau, seperti energi terbarukan dan kendaraan listrik, berpotensi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan mengurangi ketidakpastian pasar.

Lebih jauh lagi, negara yang beralih ke energi terbarukan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap guncangan eksternal, seperti krisis energi global atau perubahan geopolitik. Dengan menekan depedensi terhadap energi fosil yang rentan terhadap fluktuasi harga internasional, negara menjadi lebih tahan terhadap lonjakan harga energi. *Green economy* juga mendukung ketahanan pangan melalui pengelolaan pertanian yang berkelanjutan, mengurangi kerentanannya terhadap perubahan iklim, dan menjaga stabilitas pasokan pangan. Dengan demikian, transisi ke ekonomi hijau bukan hanya memberi manfaat terhadap lingkungan, tetapi juga menjadi strategi yang bijaksana untuk mencapai kestabilan ekonomi jangka panjang.

Dalam penelitian mengenai ekonomi hijau (*green economy*) dan dampaknya terhadap inflasi, sejumlah ahli telah memberikan wawasan yang mendalam mengenai bagaimana transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan dapat mempengaruhi kestabilan harga dan perekonomian secara keseluruhan. Salah satu kontribusi utama datang dari Babkin et al. (2023), yang menekankan bahwa transisi menuju ekonomi hijau dapat berfungsi sebagai alat untuk mengurangi volatilitas lingkungan. Menurut mereka, dengan mengimplementasikan praktik berkelanjutan dan teknologi hijau, negara dapat mengurangi risiko yang terkait dengan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, yang kerap menyebabkan fluktuasi harga yang

signifikan. Risiko lingkungan yang tinggi seperti bencana alam akibat perubahan iklim atau kerusakan ekosistem seringkali mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menyebabkan lonjakan harga barang dan jasa. Oleh karena itu, ekonomi hijau, dengan cara mengurangi ketidakpastian lingkungan, dapat menciptakan kondisi yang lebih stabil untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pengendalian inflasi.

Green economy, melalui kebijakan yang diusulkan dalam Inflation Reduction Act (IRA), memiliki potensi untuk menekan inflasi meskipun terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Pertama, dengan investasi dalam energi terbarukan dan pengurangan permintaan energi yang diproyeksikan hampir 6% antara tahun 2021 dan 2032, biaya energi dapat menurun. Penurunan biaya energi ini berpotensi mengurangi tekanan inflasi, mengingat energi merupakan komponen penting dalam biaya hidup. Selain itu, dengan menurunnya biaya energi, pendapatan disposabel masyarakat dapat meningkat, yang pada gilirannya dapat merangsang konsumsi tanpa menambah tekanan inflasi. Meskipun ada proyeksi bahwa Indeks Harga Konsumen (CPI) dapat naik sebesar 0.38% pada tahun 2031 akibat peningkatan permintaan domestik, dampak ini relatif kecil dibandingkan dengan manfaat yang diharapkan dari penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan PDB. Terakhir, pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 37% dibandingkan dengan tingkat tahun 2005 menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan, yang dapat mendukung stabilitas ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, meskipun terdapat potensi untuk sedikit peningkatan inflasi, manfaat dari pengurangan biaya energi, peningkatan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari *green economy*

dapat membantu menekan inflasi dalam jangka panjang.

Alessi et al. (2023) memberikan pandangan tambahan mengenai pengaruh *Green Economy* terhadap stabilitas ekonomi, khususnya dalam hal investasi. Mereka mengamati bahwa semakin banyak investor yang mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance/ESG*) dalam pengambilan keputusan investasi mereka. Penelitian mereka menunjukkan bahwa perusahaan yang berkomitmen pada praktik berkelanjutan sering kali dianggap lebih aman dan stabil dalam jangka panjang. Hal ini berkontribusi pada persepsi risiko yang lebih rendah, yang memungkinkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk mendapatkan modal dengan biaya yang lebih rendah. Dengan demikian, selain memberikan manfaat bagi lingkungan, ekonomi hijau juga dapat berfungsi sebagai stabilisator harga dengan menciptakan pasar investasi yang lebih aman dan meminimalkan fluktuasi pasar yang bisa mendorong inflasi.

Investasi hijau juga diakui sebagai kunci untuk menciptakan kesempatan kerja baru serta mengoptimalkan efisiensi produksi. Inderst et al. (2012) menyoroti pentingnya investasi dalam teknologi hijau, yang dapat mengurangi biaya produksi sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru. Dengan memfokuskan sumber daya pada pengembangan energi terbarukan dan teknologi yang lebih efisien, *green economy* tidak hanya mendukung pertumbuhan sektor energi tetapi juga sektor-sektor lain yang bergantung pada energi, seperti industri manufaktur dan transportasi. Ketika masyarakat mendapatkan karier yang lebih menjanjikan dengan gaji yang lebih besar daya beli mereka akan meningkat, yang pada gilirannya mendukung permintaan barang dan jasa yang lebih stabil. Permintaan yang stabil ini dapat mengurangi volatilitas ekonomi dan menekan inflasi, karena permintaan yang tidak

berlebihan cenderung menjaga kestabilan harga.

Lebih lanjut, Clark et al. (2018) mengidentifikasi bagaimana kebijakan yang mendukung *green economy* dapat mengurangi risiko sosial dan ekonomi yang sering kali berkontribusi pada inflasi. Misalnya, kebijakan yang mendukung keberlanjutan dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan, di mana lapangan kerja dan kesempatan ekonomi tersedia lebih merata. Ketika masyarakat merasa lebih aman secara ekonomi, mereka lebih cenderung menghabiskan uang mereka untuk barang dan jasa, yang mendukung permintaan yang lebih sehat dalam perekonomian. Dalam konteks ini, kebijakan yang memfasilitasi transisi menuju *green economy* dapat meningkatkan rasa stabilitas sosial dan mengurangi ketidakpastian ekonomi. Ketidakpastian yang berkurang ini akan membantu kebijakan moneter bekerja lebih efektif untuk menjaga kestabilan harga dan menghindari inflasi yang berlebihan.

Criscuolo dan Menon (2015) lebih jauh lagi menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang mendukung penggunaan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, yang sering kali rentan terhadap fluktuasi harga global. Ketergantungan pada energi fosil yang fluktuatif dapat menyebabkan ketidakstabilan harga yang merugikan perekonomian, karena lonjakan harga energi akan berdampak langsung pada biaya produksi barang dan jasa. Dengan mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan beralih ke energi terbarukan, negara dapat menciptakan stabilitas harga yang lebih besar. Kebijakan seperti *feed-in tariffs*, yang mendukung pembangkit energi terbarukan dengan memberikan insentif kepada produsen energi, dapat membantu mengurangi ketergantungan pada pasokan energi eksternal yang sering mengalami lonjakan harga. Dengan demikian, ekonomi

hijau tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga berperan dalam menciptakan stabilitas harga domestik dan global.

Secara keseluruhan, kontribusi dari berbagai ahli ini menunjukkan bahwa *green economy* memiliki potensi untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih besar dan mengurangi inflasi. Praktik berkelanjutan dan investasi dalam teknologi hijau tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang signifikan, seperti pertumbuhan lapangan kerja, peningkatan efisiensi, dan stabilitas harga. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung transisi menuju *green economy* harus dipandang sebagai langkah penting dalam menciptakan perekonomian yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, *green economy* dapat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi volatilitas harga, mengendalikan inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang inklusif dan ramah lingkungan.

Dampak Kebijakan *Green Economy* terhadap Pasar Tenaga Kerja

Green economy atau ekonomi hijau berdampak signifikan pada pasar tenaga kerja dengan menciptakan perubahan dalam struktur pekerjaan dan kebutuhan keterampilan. Dalam transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan, sektor-sektor yang berpolusi tinggi cenderung mengalami penurunan, seperti industri batu bara, minyak, dan gas. Pekerjaan di sektor-sektor ini cenderung berkurang, yang dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja bagi banyak pekerja. Di sisi lain, sektor-sektor yang berfokus pada keberlanjutan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan teknologi hijau, mengalami pertumbuhan. Hal ini menciptakan peluang kerja baru, tetapi juga menimbulkan tantangan bagi pekerja yang terlibat dalam industri tradisional yang terancam.

Pekerja di sektor-sektor yang terpolusi tinggi sering kali menghadapi risiko pemutusan hubungan kerja dan kesulitan dalam beralih ke pekerjaan baru, terutama jika mereka tidak memiliki keterampilan yang relevan untuk sektor hijau. Pekerjaan di sektor hijau seringkali memerlukan keterampilan yang lebih tinggi, terutama dalam bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM). Pekerja yang ingin beralih ke pekerjaan hijau perlu mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang sesuai untuk memenuhi tuntutan keterampilan baru ini. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan menjadi sangat penting untuk memfasilitasi peralihan ini. Kebijakan yang mendukung pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan, terutama bagi kelompok yang rentan seperti pekerja berpendidikan rendah dan pekerja senior, sangat diperlukan untuk mengurangi risiko pengangguran jangka panjang.

Kebijakan publik memainkan peran kunci dalam memfasilitasi transisi yang adil ke ekonomi hijau. Pemerintah dapat mengimplementasikan program-program yang mendukung pekerja yang terdampak, seperti program pelatihan ulang, dukungan keuangan, dan insentif untuk perusahaan yang menciptakan pekerjaan hijau. Selain itu, regulasi yang mendukung mobilitas pekerja dan fleksibilitas pasar tenaga kerja dapat membantu mempercepat transisi ini. Misalnya, kebijakan perumahan yang mendukung mobilitas pekerja dapat mengurangi hambatan bagi mereka yang perlu pindah untuk mendapatkan pekerjaan baru di sektor hijau. Dengan pendekatan yang tepat, kebijakan publik dapat membantu mengurangi dampak negatif dari transisi ini dan memastikan bahwa manfaatnya dirasakan oleh semua.

Transisi ke ekonomi hijau secara signifikan mempengaruhi pasar tenaga kerja dengan membentuk kembali peluang kerja dan dinamika pekerjaan. Ketika kebijakan lingkungan menjadi lebih ketat, mereka

mendorong pengembangan industri yang lebih hijau, yang dapat mengarah pada penciptaan lapangan kerja baru di sektor-sektor seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan pertanian berkelanjutan. Pergeseran ini tidak hanya mempromosikan pasar tenaga kerja yang lebih hijau tetapi juga membutuhkan tenaga kerja yang dilengkapi dengan keterampilan yang diperlukan untuk peran yang muncul ini. Efektivitas kebijakan lingkungan ini dalam mendorong penciptaan lapangan kerja sering ditingkatkan di negara-negara dengan kebijakan pasar tenaga kerja yang terkoordinasi dan pengaturan perundingan bersama, karena kerangka kerja ini memfasilitasi kolaborasi antara bisnis, pekerja, dan pemerintah untuk mendukung tujuan transformasi hijau bersama.

Selain itu, efektivitas kebijakan lingkungan dalam mempromosikan transisi pekerjaan ke peran yang lebih hijau dapat dipengaruhi oleh kebijakan pasar tenaga kerja tertentu dan fitur struktural dalam suatu negara. Misalnya, kebijakan yang mendukung realokasi pekerja, seperti program pelatihan, dapat memainkan peran penting dalam memudahkan transisi bagi pekerja yang pindah ke pekerjaan yang lebih hijau. Namun, makalah tersebut menunjukkan bahwa langkah-langkah dukungan semacam itu secara historis tidak dirancang untuk secara khusus membantu penghijauan pasar tenaga kerja, yang dapat membatasi efektivitasnya. Selain itu, kehadiran peraturan perlindungan ketenagakerjaan yang ketat dan tunjangan pengangguran yang besar dapat mengurangi insentif bagi pekerja untuk beralih ke peran baru, sehingga mempengaruhi dampak keseluruhan kebijakan lingkungan terhadap penciptaan lapangan kerja dan keberlanjutan.

Akhirnya, dampak ekonomi hijau pada pasar tenaga kerja tidak seragam di berbagai negara. Analisis empiris menunjukkan bahwa sementara kebijakan lingkungan yang ketat dapat mempromosikan pasar tenaga kerja

yang lebih hijau, efektivitasnya dapat secara signifikan dipengaruhi oleh kebijakan pasar tenaga kerja yang ada dan fitur struktural. Misalnya, pengeluaran yang lebih tinggi untuk dukungan retensi pekerjaan dapat menyebabkan penurunan efektivitas kebijakan lingkungan dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih hijau. Oleh karena itu, memahami interaksi antara kebijakan lingkungan dan karakteristik pasar tenaga kerja sangat penting untuk merancang strategi efektif yang tidak hanya mengatasi perubahan iklim tetapi juga memastikan transisi yang adil bagi pekerja dalam ekonomi yang berkembang.

Kebijakan ekonomi hijau dirancang untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan sambil mengatasi tantangan lingkungan. Kebijakan ini dapat berdampak signifikan pada pasar tenaga kerja dengan mengalihkan lapangan kerja dari sektor tradisional dengan karbon tinggi ke industri rendah karbon yang sedang berkembang. Seiring dengan percepatan transisi hijau, diharapkan dampak lapangan kerja agregat akan tetap terbatas. Menurut penilaian dampak dari inisiatif "Fit for 55" Uni Eropa, pertumbuhan lapangan kerja agregat diperkirakan berkisar antara 0,3% dan 0,5% pada tahun 2030, berdasarkan simulasi dari berbagai alat pemodelan ekonomi makro seperti JRC-GEM-E3, E3ME, dan E-QUEST. Selain itu, CEDEFOP (2021) memprediksi skenario yang lebih optimis, memperkirakan peningkatan 1,2% dalam pertumbuhan lapangan kerja pada tahun 2030 terkait dengan penerapan Kesepakatan Hijau Eropa. Namun, perubahan substansial akan terjadi di seluruh sektor, perusahaan, pekerjaan, dan wilayah. Misalnya, sementara jumlah pekerjaan secara keseluruhan mungkin tidak berubah secara drastis, jenis pekerjaan yang tersedia akan berkembang, dengan peningkatan yang signifikan dalam permintaan akan pekerjaan hijau, yang penting untuk mendukung transisi ke ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Transisi ke ekonomi hijau dapat mengarah pada penciptaan lapangan kerja di sektor-sektor seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan pertanian berkelanjutan. Sektor-sektor ini cenderung mengalami pertumbuhan lapangan kerja yang kuat karena investasi dalam teknologi hijau dan infrastruktur meningkat. Sebaliknya, sektor tradisional, terutama yang bergantung pada bahan bakar fosil, mungkin menghadapi kehilangan pekerjaan. Makalah ini menyoroti bahwa pekerjaan coklat, yang terkait dengan emisi karbon tinggi, akan terpengaruh paling negatif, yang mengarah pada potensi pengangguran struktural di daerah yang sangat bergantung pada industri ini. Pembuat kebijakan harus mengantisipasi perubahan ini dan menerapkan strategi untuk mendukung pekerja yang terkena dampak, memastikan bahwa transisi itu adil dan inklusif.

Untuk mengurangi dampak negatif dari transisi hijau, dukungan kebijakan yang efektif sangat penting. Ini termasuk menyediakan program pendidikan dan pelatihan untuk membantu transisi pekerja ke peran baru, serta menawarkan perlindungan sosial dan dukungan kerja kembali. Makalah ini menekankan pentingnya mengatasi kekhususan sosial ekonomi regional, karena kemudahan realokasi tenaga kerja akan tergantung pada kesamaan keterampilan dan lokasi pekerjaan. Dengan secara proaktif mengatasi tantangan ini, pembuat kebijakan dapat meningkatkan efek positif dari kebijakan ekonomi hijau di pasar tenaga kerja, yang pada akhirnya mendorong tenaga kerja yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Tantangan Implementasi Green Economy dalam Menekan Inflasi

Implementasi *green economy* menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, terutama dalam hubungannya dengan mekanisme inflasi yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Salah satu tantangan utama dalam transisi ini adalah tingginya biaya

awal yang diperlukan untuk melakukan investasi dalam sektor-sektor hijau. Sebagai contoh, pengembangan infrastruktur energi terbarukan, seperti panel surya atau turbin angin, membutuhkan investasi besar yang tidak hanya melibatkan pengadaan teknologi canggih tetapi juga pengembangan infrastruktur pendukung yang memadai. Menurut Voigts dan Paret (2024), meskipun tujuan jangka panjang dari investasi ini adalah untuk mengurangi biaya energi dan ketergantungan pada sumber energi fosil, kenyataan bahwa biaya awal yang tinggi diperlukan dapat menyebabkan lonjakan harga barang dan jasa di pasar. Kenaikan harga ini berpotensi memicu inflasi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan menciptakan ketidakpastian ekonomi. Hal ini memperlihatkan tantangan besar bagi pemerintah dalam menciptakan keseimbangan antara mencapai tujuan keberlanjutan dan menghindari dampak ekonomi yang merugikan pada jangka pendek. Voigts dan Paret mencatat bahwa meskipun insentif pajak dan subsidi diberikan untuk merangsang investasi di sektor hijau, efek jangka pendek dari kebijakan tersebut seringkali berlawanan dengan tujuan awal, yaitu untuk menurunkan biaya energi secara keseluruhan.

Auerbach and Gorodnichenko (2012) memberikan perspektif tambahan dengan menekankan bahwa investasi dalam sektor hijau bisa memiliki multiplier yang lebih tinggi selama masa resesi, karena dapat merangsang permintaan agregat dan menciptakan lapangan pekerjaan. Mereka mencatat bahwa pengeluaran untuk sektor hijau dapat memiliki multiplier sekitar 1,5 selama resesi, yang berarti setiap dolar yang diinvestasikan berpotensi menghasilkan lebih banyak aktivitas ekonomi dalam periode krisis. Namun, dalam kondisi ekonomi yang lebih stabil atau pertumbuhan ekonomi yang lebih normal, dampak inflasi dari investasi hijau bisa

lebih terasa. Dalam konteks ini, pengeluaran untuk sektor hijau mungkin tidak cukup untuk meredam kenaikan harga barang dan jasa yang dihasilkan dari peningkatan permintaan terhadap bahan baku dan tenaga kerja yang diperlukan. Hal ini menunjukkan pentingnya perencanaan kebijakan yang matang untuk memastikan bahwa inflasi yang dihasilkan dari transisi ini dapat dikelola dengan hati-hati agar tidak menurunkan daya beli masyarakat, terutama dalam kondisi ekonomi yang lebih stabil.

Inflasi yang meningkat, akibat dari meningkatnya biaya investasi dan produksi dalam sektor hijau, juga dapat berimbas pada daya saing produk domestik di pasar internasional. Ketika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, produk yang dihasilkan domestik menjadi lebih mahal dibandingkan dengan produk dari negara lain yang tidak mengalami tingkat inflasi yang serupa. Hal ini berpotensi menurunkan daya saing ekspor domestik dan mengurangi pangsa pasar internasional. Batini et al. (2022) menunjukkan bahwa meskipun pengeluaran untuk inisiatif hijau dapat meningkatkan aktivitas ekonomi lebih banyak dibandingkan pengeluaran non-hijau, perlunya strategi kebijakan yang hati-hati sangat penting untuk menghindari ketidakstabilan harga yang berpotensi merugikan perekonomian domestik. Tanpa pengelolaan yang cermat, inflasi yang timbul dari sektor hijau bisa mengarah pada penurunan daya saing produk domestik di pasar internasional, yang pada gilirannya bisa memperburuk neraca perdagangan negara dan mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengawasan dan pengelolaan inflasi menjadi elemen krusial dalam strategi ekonomi hijau yang sukses.

Foster et al. (2023) memberikan analisis yang relevan mengenai dampak dari kebijakan besar di AS, seperti *Inflation Reduction Act* (IRA), yang bertujuan untuk mendorong

investasi dalam energi terbarukan dan menciptakan lapangan kerja hijau. Mereka menemukan bahwa meskipun investasi dalam energi terbarukan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, ada risiko besar bahwa peningkatan permintaan terhadap bahan baku dan tenaga kerja yang terkait dengan sektor hijau dapat menyebabkan inflasi. Dalam konteks ini, risiko inflasi bukan hanya berasal dari biaya investasi awal yang tinggi, tetapi juga dari peningkatan permintaan terhadap sumber daya yang terbatas, yang dapat memperburuk ketidakseimbangan pasar. Foster et al. menyarankan bahwa untuk memaksimalkan manfaat dari investasi hijau, perlu ada perhatian khusus terhadap cara distribusi insentif dilakukan serta strategi pengelolaan inflasi yang lebih terperinci. Salah satu langkah yang mereka rekomendasikan adalah dengan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, yang pada gilirannya dapat menurunkan biaya dalam jangka panjang dan mengurangi dampak inflasi pada daya beli masyarakat.

Mengingat tantangan-tantangan tersebut, penting bagi pembuat kebijakan untuk merancang strategi yang tidak hanya mendorong investasi hijau tetapi juga mempertimbangkan dampak inflasi yang timbul sebagai akibat dari transisi ini. Dalam merancang kebijakan tersebut, pembuat kebijakan perlu mencari keseimbangan antara dorongan terhadap sektor hijau dengan upaya untuk menjaga stabilitas harga agar tidak membebani ekonomi secara berlebihan. Salah satu pendekatan yang mungkin adalah dengan mengintegrasikan kebijakan fiskal dan moneter yang lebih fleksibel, sehingga dapat menanggapi dinamika inflasi yang mungkin muncul seiring berjalannya waktu. Misalnya, meningkatkan insentif untuk inovasi dan efisiensi energi di sektor hijau dapat mempercepat penurunan biaya produksi, yang pada gilirannya akan mengurangi tekanan

inflasi dalam jangka panjang. Selain itu, kebijakan ini perlu didesain untuk memastikan bahwa sektor-sektor yang lebih efisien dan berkelanjutan, seperti kendaraan listrik dan peralatan hemat energi, mendapatkan dukungan yang tepat agar dapat meningkatkan output dan daya saing mereka di pasar global. Hal ini penting agar produk-produk hijau tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga kompetitif secara ekonomis di pasar global.

Dengan pendekatan yang seimbang, diharapkan dapat dicapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengorbankan stabilitas harga. Keberhasilan transisi menuju ekonomi hijau sangat bergantung pada perencanaan kebijakan yang memperhatikan dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengelola transisi ini dengan hati-hati dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan kestabilan ekonomi. Jika inflasi dapat dikendalikan dengan bijaksana, maka masyarakat akan menikmati manfaat dari transisi menuju ekonomi hijau tanpa harus menghadapi tekanan inflasi yang berlebihan. Pada akhirnya, pencapaian ekonomi hijau yang sukses tidak hanya akan membawa dampak positif bagi lingkungan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Rekomendasi untuk Penerapan Green Economy

Untuk mempercepat penerapan *green economy*, penting bagi pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan fiskal yang mendukung transisi menuju keberlanjutan. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah pemberian subsidi energi terbarukan untuk menekan biaya awal yang seringkali menjadi hambatan bagi negara dalam beralih dari energi fosil ke energi bersih. Subsidi ini dapat mencakup insentif untuk instalasi panel surya,

pembelian kendaraan listrik, atau pengembangan infrastruktur hijau lainnya. Dengan memberikan insentif fiskal ini, pemerintah tidak hanya mengurangi beban biaya yang ditanggung oleh masyarakat dan sektor bisnis, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor energi terbarukan yang ramah lingkungan. Kebijakan ini juga dapat mempercepat transisi energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya energi yang tidak terbarukan.

Selain itu, peningkatan investasi di sektor hijau menjadi langkah yang tak kalah penting dalam upaya menciptakan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah dapat mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta melalui skema kemitraan yang saling menguntungkan. Misalnya, pemerintah bisa menawarkan insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam proyek-proyek ramah lingkungan, menyediakan dana hibah, pinjaman berbunga rendah, dsb. Kolaborasi ini akan mempercepat penerapan *green economy*, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan daya saing industri nasional di pasar global yang semakin mengutamakan keberlanjutan.

Edukasi dan kesadaran publik juga sangat penting dalam penerapan *green economy*. Kampanye edukasi yang efektif harus diluncurkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perilaku ramah lingkungan. Melalui media sosial, seminar, dan program pendidikan di sekolah-sekolah, informasi mengenai manfaat dari pengurangan limbah, penggunaan energi terbarukan, dan praktik pertanian berkelanjutan dapat disebarluaskan. Masyarakat yang sadar akan isu lingkungan lebih cenderung untuk mengadopsi gaya hidup yang mendukung keberlanjutan. Dengan adanya kesadaran yang lebih besar tentang dampak negatif perubahan iklim dan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang bijak, masyarakat akan lebih termotivasi untuk mengadopsi perilaku yang

lebih ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan juga sangat penting. Melalui forum diskusi dan konsultasi publik, suara masyarakat dapat didengar dan diakomodasi dalam kebijakan yang diambil. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan terhadap inisiatif *green economy*. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek hijau, kita dapat memastikan bahwa solusi yang diterapkan relevan dengan kebutuhan lokal dan lebih efektif dalam mencapai tujuan keberlanjutan. Selain itu, dukungan dari lembaga internasional juga sangat penting dalam mempercepat transisi menuju ekonomi hijau. Kerja sama dengan organisasi internasional dapat membuka akses kepada teknologi terbaru serta pendanaan untuk proyek-proyek ramah lingkungan. Melalui kolaborasi ini, Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara lain dalam menerapkan kebijakan *green economy* yang berhasil. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan kapasitas domestik dalam mengembangkan teknologi hijau yang sesuai dengan kebutuhan nasional.

Terakhir, perlu adanya inovasi dalam teknologi ramah lingkungan sebagai bagian dari strategi *green economy*. Penelitian dan pengembangan (R&D) di bidang teknologi hijau harus didorong agar Indonesia mampu menciptakan solusi lokal untuk tantangan lingkungan yang dihadapi. Dengan memfokuskan pada inovasi, Indonesia tidak hanya akan menjadi konsumen teknologi hijau tetapi juga produsen yang mampu bersaing di pasar global. Inovasi ini juga dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional industri dan meningkatkan kinerja lingkungan secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Penerapan ekonomi hijau merupakan langkah strategis yang penting dalam menghadapi tantangan lingkungan dan ekonomi saat ini. Dengan meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan, ekonomi hijau tidak hanya menekankan kemajuan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mitigasi efek buruk yang terkait dengan praktik bisnis konvensional. Dengan mengimplementasikan praktik berkelanjutan dan teknologi hijau, negara dapat mengurangi risiko yang terkait dengan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, yang sering kali menyebabkan ketidakstabilan harga barang dan jasa. Selain itu, investasi dalam sektor-sektor yang berkelanjutan dapat menciptakan peluang kerja baru, peningkatan kapasitas pembelian individu, dan pada akhirnya membantu meredam tekanan inflasi.

Kebijakan yang memfasilitasi transformasi ini sangat penting untuk menjamin bahwa ekspansi ekonomi tidak hanya bertahan lama, tetapi juga inklusif. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menciptakan keseimbangan antara investasi awal yang tinggi dan dampak jangka pendek terhadap ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan publik yang mendukung inovasi dan teknologi hijau sangat penting untuk memastikan keberhasilan transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan dan stabil. Dengan dukungan yang kuat dari semua pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat, transisi menuju ekonomi hijau dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil, tahan terhadap guncangan, dan ramah lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Abu-Ghunmi, D., Abu-Ghunmi, L., Khamees, B.A., Anderson, K., & Abu-Ghunmi, M. 2023. Green economy and stock market returns: Evidence from

- European stock markets. *Journal of Open Innovation*, 9(3).
<https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100146>
- Anwar, M. 2022. Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 343–356.
<https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1S.1905>
- Cassola, N., Morana, C., & Ossola, E. 2023. Green risk in Europe. *CefES-Center for European Studies Paper Series*, (526).
<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4562028>
- Causa, O. et al. 2024. “Labour markets transitions in the greening economy: Structural drivers and the role of policies”. *OECD Economics Department Working Papers*, No. 1803, OECD Publishing, Paris.
<https://doi.org/10.1787/d8007e8f-en>
- Chygryn, O., Pimonenko, T., & Lyulyov, O. 2022. Green Investment as An Economic Instrument to Achieve SDGs. In *Reducing Inequalities Towards Sustainable Development Goals* (pp. 69-90). River Publishers.
<https://doi.org/10.1201/9781003338543-5>
- Dhayal, K. S., Giri, A. K., Esposito, L., & Agrawal, S. 2023. Mapping the significance of green venture capital for sustainable development: A systematic review and future research agenda. *Journal of Cleaner Production*, 396, 136489.
[10.1016/j.jclepro.2023.136489](https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.136489)
- Huang, Y., & Liao, R. 2021. Polycentric or monocentric, which kind of spatial structure is better for promoting the green economy? Evidence from Chinese urban agglomerations. *Environmental Science and Pollution Research*, 28, 57706-57722.
[10.1007/s11356-021-14655-2](https://doi.org/10.1007/s11356-021-14655-2)
- IEA/OECD. 2023. Bahaya terkait iklim: Kebakaran hutan, Statistik Lingkungan, (basis data). Diakses pada 11 Desember 2024, dari
<https://oe.cd/dx/4TI>
- International Monetary Fund. Research Dept. 2022. "A Greener Labor Market: Employment, Policies, and Economic Transformation". In *World Economic Outlook*, April 2022. USA: International Monetary Fund. Diakses pada 29 November 2024, dari
<https://doi.org/10.5089/9798400255892.081>
- Lumbanraja, P. C. and Lumbanraja, P. L. 2023. Analisis Variabel Ekonomi Hijau (Green Economy Variable) Terhadap Pendapatan Indonesia (Tahun 2011-2020) dengan Metode SEM-PLS. *Cendekia Niaga*, 7(1): 61-73.
<https://jurnal.kemendag.go.id/index.php/JCN/article/view/836>
- Makmun, M. 2011. Green Economy: Konsep, Impelentasi Dan Peran Kementerian Keuangan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan LIPI*, 19(2): 1-15.
<https://doi.org/10.14203/JEP.19.2.2011.1-15>
- Miles, M.B., & Huberman, A.M. 1994. *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. Sage Publications.
- Mudrika, S., Suharjo, D., Deni, D., & Wiadi, I. 2024. Sustainability in Marketing: Exploring the Impact of Green Marketing on Environmental Concern and Customer Satisfaction. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)*, 11(2): 97-112.
<https://doi.org/10.18415/ijmmu.v11i2.5431>
- Onaran, Ö., & Oyvatt, C. 2023. *The employment effects of public spending in*

- infrastructure, the care economy and the green economy: the case of emerging economies.
<http://gala.gre.ac.uk/id/eprint/38515>
- Pallaske, G. 2024. Analyzing sustainable development strategies through multi-method integration in the green economy model. *Ecological Modelling*, 496, 110828.
<https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2024.110828>
- Petrica, I. M., Caraiania, C., Lungua, C. I., & Anica-Popaa, L. E. 2024. The interconnectivity of ESG research within the realm of sustainability: A bibliometric analysis. *Journal of Accounting and Management Information Systems*, 23(1): 261-290.
<http://dx.doi.org/10.24818/jamis.2024.01011>
- Putra, J. J. H., Nabilla, N., & Jabanto, F. Y. 2021. Comparing “Carbon Tax” and “Cap and Trade” as Mechanism to Reduce Emission in Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 11(5): 106-111.
<https://doi.org/10.32479/ijeep.11375>
- Rani, P., & Sharma, S. 2024. Role Of The Green Economy In Sustainable Development. *ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts*, 5(2): 454-461.
<https://doi.org/10.29121/shodhkosh.v5.i2.2024.2428>
- Rusandi, & Muhammad Rusli. 2021. Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(2), 48-60.
<https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Soukotta, A., dkk. 2023. Inflation, Investment, And Economic Growth. *International Journal of Economic and Management Research*, 2(3): 112-120.
<https://doi.org/10.55606/ijemr.v2i3.131>
- Suárez-Cuesta, D., & Latorre, M. C. 2024. Challenges in greening the economies: a computable general equilibrium analysis of the Inflation Reduction Act (IRA). Available at SSRN 4914030.
<https://ssrn.com/abstract=4914030>
- Sudjono. 2023. Green Economic Transformation: Opportunities and Challenges for Sustainable Development. *International Journal of Science and Society*, 5(5): 825-835.
<https://doi.org/10.54783/ijso.v5i5.947>
- Taslima, N., Sayem, M. A., Sidhu, G. S., & Chowdhury, F. 2024. Mitigating inflation: A comprehensive analysis of policy measures and their impacts on the US Economy. *Frontline Marketing, Management and Economics Journal*, 4(07): 17-38.
<https://doi.org/10.37547/marketing-fmmej-04-07-03>
- Vandeplas, A., Vanyolos, I., Vigani, M., & Vogel, L. 2022. The Possible Implications of the Green Transition for the EU Labour Market. European Commission. [10.2765/583043](https://doi.org/10.2765/583043)
- Voigts, S., & Paret, A. C. 2024. Emissions Reduction, Fiscal Costs, and Macro Effects: A Model-based Assessment of IRA Climate Measures and Complementary Policies. International Monetary Fund.
- Yanti, D. H. D., Rohman, A. F., & Hwihanus, H. 2024. Meta-Analysis of the Impact of Green Economy on Labour Market: Case Studies from Different Countries. *International Journal of Management, Business, and Economics*, 1(2).
<https://journals.net/access/IJMBE/article/view/17>

- Zhironkin, S., & Cehlár, M. (2022). Green Economy and Sustainable Development: The Outlook. *Energies*, 15(3), 1167. <https://doi.org/10.3390/en15031167>
- Suh, Y., Woo, C., Koh, J., & Jeon, J. (2019). Analysing the satisfaction of university–industry cooperation efforts based on the Kano model: A Korean case. *Technological Forecasting and Social Change*, 148, 119740. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119740>
- Tjiptono, F. (2021). *View Article Strategi Pemasaran Jasa*. 2009.